

**INPRES NO 14 TAHUN 1967 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
IDENTITAS MUSLIM TIONGHOA CIREBON
TAHUN 1966-1998**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

POPI SITI SOPIAH

14123151177

**JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON**

2016 M/1436 H

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Popi Siti Sopiah.14123151177. *Inpres No 14 Tahun 1967 Dan Implikasinya Terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon Tahun 1966-1998*. Skripsi. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Ushuludin Adab Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2016.

Pada awal Orde Baru (1966-1998), Soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut agar secara individual sifat-sifat ketionghoannya mampu dihapuskan. Kebijakan pada rezim Soeharto tersebut dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Orde Baru mengharuskan seluruh orang Tionghoa untuk melakukan asimilasi dengan pribumi melalui beberapa hal seperti penggantian nama Tionghoa dengan nama pribumi, pembatasan ruang gerak pada adat istiadat yang berbau Tionghoa serta agama orang Tionghoa yang harus mengikuti agama yang diakui oleh pemerintah. Agar lebih tajam, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimanakah gambaran kehidupan Muslim Tionghoa Cirebon sebelum dikeluarkannya Inpres No.14 tahun 1967? 2) Apa yang melatarbelakangi munculnya Inpres No.14 Tahun 1967? 3) Bagaimanakah implikasi dari dikeluarkannya Inpres No 14 Tahun 1967 terhadap identitas Muslim Tionghoa Cirebon? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui gambaran umum Cirebon, sejarah singkat kedatangan orang-orang Tionghoa serta kehidupan sosial budayanya sebelum dikeluarkan Inpres No 14 Tahun 1967 2) Mengetahui latar belakang Inpres No 14 Tahun 1967 dikeluarkan serta dilaksanakannya bagi Muslim Tionghoa Cirebon 3) Mengetahui implikasi dari pelaksanaan Inpres No 14 Tahun 1967 terhadap identitas Muslim Tionghoa Cirebon tahun 1966-1998.

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan *library research* dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai sumber sebagai rujukan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber rujukan tersebut berupa buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dengan adanya Inpres No 14 Tahun 1967 tersebut menjadikan etnis Tionghoa terdiskriminasi karena mereka tidak diberikan ruang yang bebas untuk mengekspresikan kebudayaannya, serta harus berasimilasi dengan pribumi. Meskipun di sisi lain, asimilasi ternyata telah menjadikan pribumi menerima keberadaan orang-orang Tionghoa karena etnis Tionghoa tersebut mengidentifikasi dirinya ke dalam pribumi.

Kata Kunci: Muslim Tionghoa, Orde Baru, Asimilasi, Cirebon



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Inpres No. 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas Musim Tionghoa Cirebon Tahun 1966-1998* oleh Ppi Sti Sopiah, NIM: 141231451177 telah dimunaqasahkan pada 28 September 2016 dihadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora Islam (S. Hum) pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 13 Oktober 2016

Panitia Munaqasah	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Dedeh Nur Hamidah, M. Ag. NIP. 19710404 20112 2 001	17-10-2016	
Sekretaris Jurusan Zaenal Masduqi, M. Ag. M.A. NIP. 19720928 200312 1003	13-10-2016	
Penguji I Dr. Yayat Suryatna, M. Ag NIP. 1611010 198703 1 001	13-10-2016	
Penguji II Dedeh Nur Hamidah, M. Ag. NIP. 19710404 20112 2 001	17-10-2016	
Pembimbing I H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D NIP. 1973404N199803 1 005	13-10-2016	
Pembimbing II Aah Syafa'ah M.Ag NIP. 19730130 200212 2 001	13-10-2016	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



Dr. Hajam, M. Ag
 NIP. 19670721 200312 1002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Pernyataan Otentisitas Skripsi	v
Pengesahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Motto	viii
Persembahan	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Literatur Review / Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori / Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB II KEHIDUPAN KOMUNITAS TIONGHOA CIREBON SEBELUM DIKELUARKANNYA INPRES NO 14 TAHUN 1967	16
A. Definisi Orang Tionghoa	16
B. Gambaran Umum Cirebon.....	18
C. Sejarah Kedatangan Muslim Tionghoa di Cirebon.....	19
D. Kilas Balik Sejarah Tionghoa di Indonesia	21
E. Kehidupan Komunitas Muslim Tionghoa Cirebon.....	27
1. Aktifitas Sosial dan Budaya	27
2. Aktifitas Ekonomi	30
BAB III SEPUTAR INTRUKSI PRESIDEN NO 14 TAHUN 1966	34
A. Sekilas Mengenai Identitas Tionghoa masa Orde Lama.....	34
B. Latar Belakang Dikeluarkannya Inpres	40
BAB IV IMPLIKASI INPRES NO 14 TAHUN 1967 TERHADAP IDENTITAS MUSLIM TIONGHOA CIREBON.....	48
A. Implikasi Terhadap Budaya	48
1. Penggantian Nama	49
2. Penyelenggaraan Adat Istiadat dan Tradisi Agama	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DaftarPustaka.....	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal Orde Baru (1966-1998), Soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi¹ terhadap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Tujuan dari kebijakan tersebut agar secara individual sifat-sifat ketionghoannya mampu dihapuskan. Kebijakan pada rezim Soeharto tersebut dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Adapun isi instruksi tersebut adalah:

“tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Tionghoa yang memiliki aspek kultural pada negeri leluhur, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan; perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga”²

Keluarnya peraturan yang diskriminatif itu membuat kelompok keturunan Tionghoa mempunyai ruang kebebasan yang sangat sempit. Segala hal yang berhubungan dengan upacara ritual keagamaan, adat istiadat, praktek kebudayaan Tionghoa seperti pertunjukan barongsai, arak-arakan *toapekong*³,

¹Dalam pandangan Koentjaraningrat asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka berinteraksi secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan tersebut masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Nasib Pakpahan, *Pengertian Asimilasi Menurut Para Ahli*, <http://blog-definisi.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-asimilasi-menurut-para-ahli.html?m=1> Diunduh tanggal 07 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

²Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda “66”, *Sekitar Pembauran Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda “66”, 1985, hlm. 342-343.

³Toa Pe Kong adalah patung dewa dan dewi yang dianggap sebagai penyelamat bagi umat Khonghucu. Antara lain patung Kong Co Hian Thian Siang Tee sebagai Dewa Panglima Perang, patung Mak Co Kwan Im Pou Sat atau Dewi Welas Asih, Mak Co Po Thian Siang Seng Bo atau Dewi Laut, Kong Co Hok Cheng Shin sebagai Dewa Bumi dan Dewa Rezeki serta patung Kwan Tek Kun sebagai Dewa Perang. King Hian, *Definisi Toa Pe Kong*, <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/3649-q-a-pertanyaan-seputar-dialek-hokkian> Diunduh pada 09 Juli 2016 pukul 13:42



wayang potehi⁴, dan perayaan Imlek hanya bisa dirayakan dalam lingkungan interenal atau keluarga saja.⁵ Sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tionghoa ditutup dan semua anak sekolah harus pindah ke pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Melalui kebijakan asimilasi, pemerintah memutuskan hubungan orang-orang Tionghoa dengan leluhur mereka antara lain melalui penggantian nama bagi yang memakai nama Tionghoa, dan larangan memperdagangkan serta mengedarkan segala jenis barang yang berbau Tionghoa. Organisasi Tionghoa tertentu dilarang. Misalnya organisasi kaum totok seperti perhimpunan masyarakat berdasarkan tempat asal atau organisasi kaum peranakan seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Republik Indonesia (BAPERKI).⁶

Namun nampaknya kebijakan asimilasi tersebut tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah Orde Baru karena adanya *keambiguan*⁷ dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Di satu sisi pemerintah Orde Baru memberikan perhatiannya kepada etnis Tionghoa pada setiap pemilihan umum, bahkan ketika Orde Baru berkuasa juga memberikan kesempatan yang besar kepada etnis Tionghoa untuk berbisnis sehingga muncul kondisi di mana konglomerat dari orang-orang Tionghoa ini ada yang beraliansi dengan pemerintah. Di sisi lain, timbulnya diskriminasi dengan

⁴Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tsb dan memainkannya seperti layaknya wayang jenis lain. Wayang ini dimainkan menggunakan kelima jari tangan. Tiga jari tengah (telunjuk, jari tengah, dan jari manis) berfungsi mengendalikan bagian kepala wayang, lalu ibu jari dan jari kelingking berperan menggerakkan bagian tangan wayang.

⁵H. Junus Jahja, *Masalah Orang Tionghoa di Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana, 1998, hlm. 87

⁶Michael Jacobsen, *Chinese Muslims in Indonesia: Politics, economics, faith and expediency*, dalam Southeast Asia Research Centre, No.54, November 2003, hlm. 9

⁷Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ambigu berarti memiliki lebih dari satu makna. Jadi, kalimat ambigu berarti kalimat yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu arti.



mewajibkan adanya SBKRI⁸ untuk etnis Tionghoa saja sebagai pembuktian kewarganegaraannya meskipun lahir dan secara turun temurun sudah lama hidup di Indonesia.

Kendati etnis Tionghoa sudah lama tinggal di bumi Indonesia, mereka masih menjadi "orang asing" bagi masyarakat pribumi. Mereka juga tidak jarang digunakan sebagai alat adu domba oleh pemerintah. Sikap diskriminatif yang mereka terima baik secara politik maupun sosial, membuat sebagian warga keturunan Tionghoa merasa perlu menyamarkan identitas etnik dan kebudayaan mereka hanya agar bisa tetap *survive* di tengah-tengah masyarakat Indonesia seperti mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia dan sebagian secara resmi juga meninggalkan ajaran Konghucu warisan leluhurnya dan memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia.⁹

Seperti dituturkan Junus Jahja dikutip dari Muhamad Ali dalam Jurnal *Chinese Muslim in Colonial and Post Colonial Indonesia* :

*"...by embracing Islam young ethnic Chinese experienced that immediately they are fully accepted as fellow-Muslims and compatriots by the people at large who are 90 percent Muslims. All kinds of hostility and controversy as an inheritance of the past disappear. They are heartily welcomed now and totally assimilated into the community. So they have at last a permanent 'place in the sun'. This is exactly what ethnic Chinese are so looking and longing for".*¹⁰

⁸SBKRI merupakan akronim dari Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau hasil dari naturalisasi bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mendaftar menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun demikian kewajiban memiliki SBKRI ini dikhususkan bagi keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Eddy Setiawan, *Waspadai Kebangkitan SBKRI*, <http://blog-rekamlangkah.blogspot.co.id/2013/09/waspadai-kebangkitan-kembali-SBKRI-html?m=1> Diunduh pada 13 Maret 2016 pukul 08:00 WIB.

⁹Leovandita Eka Jati, 'Undang-undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998-2008', dalam Avatara, e-Journal Sejarah, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm. 120.

¹⁰Artinya adalah "...dengan masuk Islam, etnis Tionghoa mereka segera sepenuhnya diterima sebagai bagian dari umat oleh masyarakat luas yang 90% Muslim. Semua jenis permusuhan dan kontroversi sebagai warisan dari masa lalu menghilang. Mereka sungguh-sungguh disambut dan benar-benar berasimilasi ke dalam masyarakat. Akhirnya mereka memiliki



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda saat itu mengeluarkan kebijakan *wijkenstelsel* pada tahun 1841-1915 tentang pelarangan orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan orang Tionghoa membangun satu wilayah khusus yang disebut *pecinan* untuk tempat mereka tinggal. Sejatinya, peraturan tentang penentuan wilayah berdasarkan etnis-etnis tersebut bertujuan untuk memisahkan sejauh mungkin antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah peluang terbentuknya kekuatan untuk melawan kolonial Belanda¹¹. Akibat dari *segregasi*¹² ini adalah orang Tionghoa sulit berinteraksi dengan pribumi. Konsekuensi selanjutnya yaitu jumlah orang-orang Tionghoa Muslim semakin surut dan konversi ke Islam bagi orang Tionghoa menjadi semakin langka.¹³

Dalam menjalankan politik segregasi tersebut, pemerintah kolonial Belanda juga menetapkan pembagian masyarakat di daerah jajahannya ke dalam tiga golongan yaitu golongan masyarakat Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Banyak orang Tionghoa yang berpendidikan ala Eropa. Cara mereka berpakaian juga ala Eropa. Mereka juga mengadopsi agama Kristen dan

sebuah 'tempat di bawah sinar matahari' permanen. Ini adalah apa yang selama ini etnis Tionghoa cari?" Muhamad Ali, *Chinese Muslim in Colonial and Post Colonial Indonesia*, dalam jurnal Special Edition: Islam in Southeast Asia, Volume 7, Issue 2, Tahun 2007 hlm 12

¹¹Ester Indahyani Jusuf, 'Jalan Panjang Menuju Rasialisme', dalam Jurnal *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2002, (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia), hlm. 49.

¹² Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti dari segregasi adalah pemisahan atau pengucilan suatu golongan dari golongan lainnya.

¹³Sugiyanto, *Experiencing Islam for the Periphery* (China Muslim Indonesia hingga Memasuki Paruh Pertama Abad XX), Master Student of the Faculty of Humanities, University of Leiden, The Netherlands; on Never Ending Social and Education Syndicate (NESEdS) Semarang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Katolik seperti agama mayoritas orang Eropa di samping keyakinan yang mereka bawa dari tanah leluhurnya, dan lain sebagainya. Sangat jarang orang Tionghoa yang mengidentifikasi diri dengan identitas pribumi. Karena mereka menganggap status pribumi yang lebih rendah, interaksi dengan orang pribumi nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa menguntungkan mereka. Dalam hal tertentu orang pribumi malah terangkat derajatnya ketika misalnya ada perempuan pribumi yang dinikahi orang Tionghoa. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Tionghoa di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Tionghoa tradisional dan identitas ala Eropa.¹⁴

Selanjutnya di zaman Orde Lama, Soekarno pernah memunculkan ide bahwa orang Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia yang setara dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Artinya orang Tionghoa dipandang telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa proses asimilasi total. Bahkan pada masa ini, beberapa orang Tionghoa diperbolehkan berperan di bidang politik. Hasilnya, terdapat sebagian warga Tionghoa yang menduduki jabatan penting dalam pergerakan nasional seperti Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian. Mereka adalah orang Tionghoa yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Adapun Jap Tjwan Bing turut meresmikan UUD 1945 sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan Sementara itu Lie Kiat Teng menjabat Menteri Kesehatan dan Oey Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri.¹⁵

¹⁴DP. Budi Susetyo, *Stereotip dan relasi Antarkelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 24

¹⁵Ketika terjadi peristiwa G 30S, Indonesia punya Kabinet Dwikora I (Dwi = dua - Ko = Komando - Ra = Rakyat, Dua Komando Rakyat). Kabinet ini beranggotakan 92 orang menteri, termasuk Perdana Menteri, yang dijabat langsung oleh Presiden Soekarno. Kabinet Dwikora I berakhir 22 Februari 1966. Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora yang disempurnakan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI, ide Soekarno tersebut kandas untuk diwujudkan. Bahkan di era Orde Baru orang Tionghoa harus melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam identitas Indonesia. Pemerintah Orde Baru meragukan nasionalisme keturunan Tionghoa dan secara politis menuding mereka masih berorientasi ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang selama ini punya andil dalam membesarkan Partai Komunis di Indonesia. Pemerintah Orde Baru nampaknya tidak memperhatikan fakta bahwa orang Tionghoa peranakan ini lahir dan telah hidup lama di Indonesia.

Sementara itu, dalam konteks Cirebon, pada awal Orde Baru memang terlihat adanya pergerakan dari Tionghoa Muslim dengan membentuk suatu wadah komunitas yang bertujuan mempersatukan kaum Tionghoa Muslim yaitu Pembina Iman Tauhid Islam (PITI).¹⁶ Selain tujuan tersebut, orang-orang Tionghoa Muslim ini ingin membangun keharmonisan dengan Tionghoa non Muslim dan masyarakat pribumi Cirebon dengan identitasnya yang baru.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang pembatasan ruang gerak orang-orang Tionghoa dalam hal kebudayaan maupun agama serta bagaimana implikasinya terhadap identitas Tionghoa Muslim di Cirebon pada tahun 1966 sampai tahun 1998.

disebut juga Kabinet 100 Menteri, sebab jumlah menterinya 104. Kabinet ini hanya "memerintah Indonesia" selama 32 hari, dari 24 Februari 1966 - 28 Maret 1966. Rencananya, Kabinet Dwikora II akan dilantik oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 11 Maret 1966. Rencana ini batal, karena Istana Merdeka dikepung oleh Pasukan Kostrad, yang akan menangkap para menteri dari unsur PKI. Eddie Lembong, *Tugas dan Kewajiban Etnis Tionghoa dalam Membangun Bangsa dan Negara*, Jakarta: INTI dan LP3ES, 2002, hlm. 383

¹⁶Novita, *Perkembangan Etnis Cina Muslim di Cirebon*,
<http://portalcirebon.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-etnis-china-muslim-.html/m=1> Diunduh pada 12 November 2015 pukul 13:41



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi dibatasi pada bahasan identitas Tionghoa Muslim Cirebon dalam rentang waktu 1965-1998 (Orde Baru). Secara rincinya, rumusan masalah itu dirumuskan kedalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran kehidupan Muslim Tionghoa Cirebon sebelum dikeluarkannya Inpres No.14 tahun 1967?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya Inpres No.14 Tahun 1967?
3. Bagaimanakah implikasi dari dikeluarkannya Inpres No 14 Tahun 1967 terhadap identitas Muslim Tionghoa Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai di antaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum Cirebon, sejarah singkat kedatangan orang-orang Tionghoa serta kehidupan sosial budayanya sebelum dikeluarkan Inpres No 14 Tahun 1967
2. Mengetahui latar belakang Inpres No 14 Tahun 1967 dikeluarkan serta dilaksanakannya bagi Muslim Tionghoa Cirebon
3. Mengetahui tentang implikasi dari pelaksanaan Inpres No 14 Tahun 1967 terhadap identitas Muslim Tionghoa Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah menelaah kembali hasil-hasil penelitian terdahulu (membaca ulang sejarah) yang jarang terungkap, terutama mengenai keberadaan Tionghoa Muslim pada masa pemerintahan Orde Baru melalui Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 yang mengharuskan



etnis Tionghoa melakukan asimilasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu menganalisis perkembangan Tionghoa Muslim setelah Orde Baru.

Selain memiliki beberapa tujuan, penelitian ini pun memiliki beberapa kegunaan di antaranya :

1. Untuk mengungkapkan sejarah lokal di Cirebon, yang mana selama ini masih banyak orang yang memahami bahwa Tionghoa identik dengan Konghucu. Namun pada tataran lokal, dalam kasus ini Cirebon, Tionghoa Muslim Cirebon ternyata telah memberikan andil yang besar dalam sejarah panjang Cirebon.
2. Untuk memperkaya wawasan penulis dan pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tionghoa Muslim di Cirebon.
3. Untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD).

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk memperkaya kajian, khususnya yang terkait dengan Tionghoa Muslim di Cirebon, mengingat pada masa sebelumnya telah banyak karya tulis sejenis yang menjadikan acuan bagi skripsi ini.

Berikut beberapa hasil karya tulisan sejarah berkaitan dengan Tionghoa Muslim di Cirebon:

1. *Dilema Minoritas Tionghoa*, karya Leo Suryadinata. Membahas tentang persepsi kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa sehingga persepsi tersebut berdampak pada politik pemerintahan Indonesia. Sebagian besar

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

orang Indonesia tidak menerima orang Tionghoa peranakan maupun totok. Tionghoa peranakan maupun totok masih dianggap orang lain kecuali mereka melepaskan identitasnya sepenuhnya. Karena ketidakpercayaan kaum pribumi terhadap minoritas Tionghoa, politik dalam negeri Indonesia selalu berupaya mengurangi apa yang dianggap sebagai kekuatan ekonomi, politis, dan budaya para Tionghoa.

2. *Chinese Muslim in Colonial and Postcolonial Era*, sebuah jurnal Special Edition: Islam in Southeast Asia yang ditulis oleh Muhammad Ali. Posisi orang Tionghoa baik yang muslim maupun non muslim dijelaskan secara rinci dengan kesaksian dari beberapa tokoh besar Tionghoa Muslim yang turut serta berperan aktif dalam penulisan maupun dakwah. Dengan mengambil masa kolonial dan poskolonial, materi yang disajikan tentang perubahan sosial Tionghoa Muslim saling terikat.
3. *Tionghoa Muslim di Cirebon (Studi Proses Pembauran Etnis Tionghoa di Cirebon tahun 1970-2000)* yang merupakan sebuah skripsi karya Basori dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang proses pembauran Tionghoa Muslim di Cirebon. Di dalamnya penulis menjabarkan tentang proses pengidentifikasian diri menjadi muslimnya orang Tionghoa pada rentang waktu 1970-2000. Hal ini yang menjadi acuan penulis dalam menulis karya ilmiah dalam konteks Cirebon.
4. *Perubahan Identitas Budaya Etnis Tionghoa Di Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*”, karya I Putu Putra Kusuma Yudha. Tesis ini menjelaskan secara rinci perubahan identitas Tionghoa di Tabanan. Penelitian ini membantu mengarahkan penulis tentang bagaimana identitas baru terbentuk melalui proses asimilasi.



F. Kerangka Pemikiran

Fungsi dari kerangka pemikiran ialah sebagai alur berfikir dalam memudahkan penulis dan pembaca. Secara akademik teori dan konsep dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi sangat urgen di mana keduanya berfungsi sebagai alat analisis.¹⁸

Dalam pandangan Koentjaraningrat, asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bersosialisasi secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.¹⁹

Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa etnis Tionghoa yang bersedia mengasimilasikan diri ke dalam masyarakat Indonesia. Tinjauan pembauran atau asimilasi yang dimaksud terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Pembauran atau asimilasi juga berarti menghilangkan identifikasi sebagai golongan minoritas dengan segala bentuknya, sehingga mereka betul-betul menyatu dengan mayoritas yang utuh. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan jejak-jejak diskriminasi mayoritas atas minoritas.²⁰ Apabila orang-orang mengadakan pembauran atau asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka mereka tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok mayoritas, yang menganggap mereka sebagai orang asing. Mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan serta tujuan-tujuan yang sama.

Asimilasi setidak-tidaknya dilaksanakan dalam lima aspek kehidupan

¹⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm, 2-3.

¹⁹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009,

²⁰ Basori. *Pembauran Tionghoa Muslim Cirebon* (Skripsi S1) (Program Ilmu Sejarah Fakultas Sosial Universitas Negeri Semarang, 2008) hlm 25



yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan kekeluargaan (pernikahan).²¹ Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang memaksa kelompok etnis Tionghoa untuk melakukan asimilasi. Dengan melakukan asimilasi, identitas etnis Tionghoa membaur dengan pribumi yang dalam pelaksanaannya bisa terjadi dalam beberapa bentuk, salah satunya yang paling mungkin adalah melakukan konversi pada salah satu agama yang diakui oleh negara.

Penelaahan serta penjelasan kompleksitas sejarah pada gilirannya menghendaki penggunaan konsep-konsep dalam pendekatan sosial. Dalam konteks studi ini, tentu saja konsep asimilasi (*pembauran*). Di samping itu, kajian terhadap hubungan antara komunitas Tionghoa Muslim dan pribumi di Cirebon perlu digambarkan dengan melihat interaksinya bersama masyarakat pribumi melalui identitasnya, yakni berkenaan dengan perilaku dan interaksi manusia, juga interpretasi terhadap situasi zaman.

Perkembangan dari proses pembauran Tionghoa Muslim dan pribumi di Cirebon dalam kurun waktu itu, sudah pasti berpapasan dengan bermacam-macam perubahan sosial yang mempengaruhi sistem sosial anggotanya. Studi ini juga perlu melacak struktur sosial yang melatarbelakangi dinamika etnis Tionghoa Muslim dan perubahan-perubahan dalam masyarakat lingkungannya.

G. Metode dan Sumber Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode historis. Metode ini meliputi pengumpulan sumber, pengujian, dan penganalisaan secara kritis terhadap masa lampau dengan berdasarkan data

²¹Basori. *Ibid.* hlm 29



yang diperoleh.²² Sebagai sebuah prosedur, metode ini memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber.²³ Sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris *datum* bentuk tunggal, *data* bentuk jamak; yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber itu menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan *artifact (artefact)*.²⁴

Berdasarkan pemaparan mengenai tahap heuristik ini, penulis melakukan pengumpulan data-data (heuristik) yang berkaitan dengan Tionghoa Muslim di Cirebon. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam tahap ini adalah :

a) Studi kepustakaan, di mana referensi data-data itu penulis peroleh dari buku-buku yang berada di beberapa perpustakaan umum di Cirebon, toko-toko buku *online* maupun *offline*, dan beberapa artikel yang terdapat di internet.

b) Wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara secara langsung, yakni dengan mewawancarai berbagai narasumber yang mempunyai informasi yang dibutuhkan. Para narasumber itu bukanlah sebagai sumber primer, karena permasalahan yang sedang dibahas pun merupakan peristiwa yang sudah lama berlalu sehingga tidak

²² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 32.

²³ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm.219

²⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm.94



memungkinkan untuk mewawancarai narasumber primer dari peristiwa tersebut. Namun demikian, penulis berusaha menemukan para narasumber yang tepat dan bersikap kritis terhadap semua informasi yang didapat agar memperoleh data yang benar-benar relevan terkait masalah yang sedang dibahas.

2. Verifikasi atau Kritik

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik bersifat intern maupun ekstern.²⁵

Kritik intern hanya dapat diterapkan apabila kita sedang menghadapi penulisan di dalam dokumen-dokumen atau di dalam inskripsi-inskripsi pada monumen-monumen, mata uang-mata uang, medali-medali atau stempel-stempel. Dokumen-dokumen dapat dikatakan dengan usaha paling sedikit mengenai imajinasi, untuk mengucapkan suatu bahasa.²⁶ Kemampuan sumber meliputi kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selain itu, kepentingan dan subjektivitas sumber serta ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran. Konsistensi sumber terhadap isi atau konten.

Kritik Ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa di mana bahan semacam itu biasa digunakan atau diproduksi. Memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan.

²⁵M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *op.,cit.*,Hlm. 223.

²⁶ G.J Renier, *op.,cit.*,Hlm. 116.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Apakah itu penulisan ulang atau hasil fotokopi.²⁷ Sementara itu, kritik ekstern terhadap sumber yang diambil dari internet dengan menyortir beberapa situs/website resmi yang berkaitan dengan materi penelitian sehingga informasi yang didapatkan lebih autentik. Berkaitan dengan hal tersebut, kritik terhadap penulis dari website tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan tata bahasa yang digunakan dalam membuat artikelnya, serta alur berpikir dan ide yang disampaikan oleh penulis apakah informasi yang dimuat dalam artikel tersebut memang memiliki keterkaitan serta kedalaman materi dari artikel tersebut.

Di tahap ini penulis berusaha menyortir data-data mana sajakah yang memang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, dengan cara melakukan kritik intern dan ekstern terhadap sumber-sumber serta data-data sejarah yang ada, hingga akhirnya diperoleh fakta-fakta sejarah. Di antaranya yaitu mengkritisi bagaimana kedekatan narasumber dengan peristiwa terkait dan bagaimana keautentikan dari data-data yang telah terkumpul.

3. Interpretasi

Setelah fakta-fakta disusun, kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi sangat esensial dan krusial dalam metodologi sejarah. Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah.²⁸

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subyektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang

²⁷ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *op.,cit.*,Hlm. 224.

²⁸*Ibid.*Hlm 225



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektivitas penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Melalui interpretasi penulis berusaha menghubungkan fakta-fakta yang telah didapat dan *diverifikasi* sehingga menjadi satu kesatuan yang menghasilkan penulisan yang kronologis dan tersusun sesuai dengan penelaahan waktu kejadian peristiwa.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan.

Sejarah bukan semata-mata rangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksud ialah penghubungan antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa dan suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberian tafsiran/interpretasi kepada kejadian tersebut. Secara umum, metode sejarah, penulisan sejarah (historiografi) merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau peloporan hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁹

Langkah ini menitikberatkan kepada hasil-hasil ketiga tahapan di atas, dengan mengungkapkan dan memaparkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Paul Payne dan Tosh yang dikutip oleh Helius Sjamsuddin yang mengatakan bahwa menulis sejarah merupakan suatu

²⁹*Ibid*, Hlm. 230-231.



kegiatan intelektual dan ini suatu cara utama untuk memahami sejarah.³⁰ Sehingga terlihatlah signifikansi dari penelitian skripsi ini dan diharapkan dapat menjadi sebuah peristiwa sejarah yang berkesinambungan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian-uraian singkat yang berisi deskripsi mengenai pembahasan yang ada dalam setiap bab yang disertai dengan sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun pembahasan yang ada dalam tulisan ini bisa dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I berupa pendahuluan sebagai pengantar kepada pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, yang memuat: identifikasi masalah dan pembatasan masalah, setelah itu dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (*literatur review*), kerangka pemikiran, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim Tionghoa Cirebon sebelum dikeluarkannya Inpres No. 14 Tahun 1967.

BAB III membahas mengenai latar belakang dan pelaksanaan Inpres No. 14 tahun 1967 serta reaksi masyarakat Muslim Tionghoa Cirebon dalam menyikapi Inpres tersebut.

BAB IV membahas mengenai implikasi dari Inpres No.14 Tahun 1967 terhadap Muslim Tionghoa Cirebon pada masa Orde Baru

BAB V berisi penutup berupa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, disertai saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar apa yang tidak lengkap dibahas dalam penelitian ini dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.

³⁰Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah.*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 156.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Afif, Afthonul. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*. Depok: Penerbit Kepik
- Chambert Loir, Henri dalam Hasan Muarif Ambary. 2011. *Panggung Sejarah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Chang You, Hoo. 2012. *Identitas Tionghoa Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES
- Coppel, Charles A. 2012. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*.
- De Graf, HJ. 2004. *Cina Muslim di Jawa antara Abad XV dan XVI*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Daradjadi. 2012. *Geger Pecinan 1740-1743*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. ed: A. Sobana Hardjasaputra & Tawalinuddin Haris. 2011. *Cirebon Dalam Lima Zaman*.
- Giap, The Siauw. 1986. *Cina Muslim di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- Hariyono, Paulus. 1993. *Kultur Cina dan Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jahja, Junus. 1986. *Masalah Orang Tionghoa di Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Lembong, Eddie. 2002. *Tugas dan Kewajiban Etnis Tionghoa dalam Membangun Bangsa dan Negara*, Jakarta: INTI dan LP3ES
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group
- Masduqi, Zaenal. 2011. *Cirebon Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*. Cirebon: Nurjati Press
- M.Noer, Nurdin. 2009. *Menusa Cirebon*, Cirebon: Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota Cirebon
- Susetyo, DP. Budi . 2006. *Stereotip dan relasi Antarkelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suhardinata, JS. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Rahardjo. 1998. *Kapok Jadi Nonpri: Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Bandung: Zaman Wacana
- Soyomukti, Nurani. 2002. *Soekarno dan Cina*. Yogyakarta: Penerbit Garasi
- Suryadinata, Leo.2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: LP3ES
- Suryadinata, Leo. 2010. *Tokoh Tionghoa dan Identitas indonesia: dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES
- Suryadinata, Leo. 2002. *Dilema Minoritas Tonghoa*. Jakarta: PT Grafiti Press

Jurnal dan Artikel

- Abdul Wahid. 2006. *Dari Depresi Ekonomi hingga Dekolonisasi: Pengusaha Tionghoa dan Industri Batik Cirebon, tahun 1930an-1950an* Makalah ini dipresentasikan dalam workshop *Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tiongho Indonesia 1930an – 1960an*, NIOD-Universitas Negeri Padang
- Ester Indahyani Jusuf. 2002. 'Jalan Panjang Menuju Rasialisme', dalam Jurnal *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2002. Pusat



Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia

Michael Jacobsen. 2003. *Chinese Muslims in Indonesia: Politics, economics, faith and expediency*, dalam Southeast Asia Research Centre, No.54

Muhamad Ali. 2007. *Chinese Muslim in Colonial and Post Colonial Indonesia*, dalam jurnal Special Edition: Islam in Southeast Asia, Volume 7, Issue 2

Leovandita Eka Jati. 2013. 'Undang-undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998-2008', dalam Avatara, e-Journal Sejarah, Volume 1, No. 2

Parsudi Suparlan. 2002. 'Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural', dalam Simposium Internasional III. Jurnal Antropologi Indonesia Bali: Universitas Udayana

Sugiyanto, *Experiencing Islam for the Periphery* (China Muslim Indonesia hingga Memasuki Paruh Pertama Abad XX), Master Student of the Faculty of Humanities, University of Leiden, The Netherlands; on Never Ending Social and Education Syndicate (NESEdS) Semarang

Robert Siburian. *Etnis Cina di Indonesia: Fakta Komunikasi Antar Budaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Turnomo Rahardjo. 2005. 'Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina'. dalam *Dialogue* JIAKP. Vol. 2. No. 2

Tandjung Herning Sitabuana. 2008. Politik Hukum Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia Pada Era Global. Dalam jurnal MMH. Jilid 37. No.1. Maret

Priyanto Wibowo, *Tionghoa Dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis Tentang Posisi Dan Identita*, dalam Jurnal Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future", Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Pratiwo. 1999. 'Jalan Sebagai Perwujudan Perubahan Kultural Masyarakat Cina di Semarang', dalam Lembaran Sejarah Volume 2 No. 1. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

Internet



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Novita. *Perkembangan Etnis China Muslim di Cirebon*. Diposting pada 2005. <http://portalcirebon.blogspot.co.id/2014/01/perkembangan-etnis-china-muslim-.html/m=1>

King Hian. *Definisi Toa Pe Kong*. Diposting pada 2008. <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/3649-q-a-pertanyaan-seputar-dialek-hokkian>

Nasib Pakpahan. *Pengertian Asimilasi Menurut Para Ahli*. Diposting 2002. <http://blog-definisi.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-asimilasi-menurut-para-ahli-html?m=1>